

# **LEMBARAN DAERAH DJAWA-TENGAH**

## **Seri A                    1971                    Nr 3**

---

No. : 8 tahun 1970

Dengan Rachmat Tuhan Jang Maha Esa.

### **DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG PROPINSI DJAWA-TENGAH**

menetapkan peraturan-daerah jang berikut :

**PERATURAN-DAERAH** Propinsi Djawa-Tengah tentang pembajaran Tundjangan Hari Raja tahun 1970 / 1971, kepada pedjabat / pegawai dan para penerima pensiun / uang tunggu Daerah Propinsi Djawa-Tengah.

#### **Pasal 1.**

Terhadap pedjabat / pegawai dan para penerima pensiun / uang tunggu Daerah Propinsi Djawa-Tengah, berlaku mutatis mutandis Instruksi Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 12 Nopember 1970, No. B. 570/SD/10/11/1970, tentang pembajaran Tundjangan Hari Raja Tahun 1970 / 1971 kepada pedjabat / pegawai dan para penerima pensiun / uang tunggu.

#### **Pasal 2.**

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Djawa Tengah dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 Nopember 1970.

Semarang, 15 Desember 1970.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah  
Gotong Rojong Propinsi Djawa-Tengah ;

Wakil Ketua,

S O E M A R I O.

Gubernur Kepala Daerah  
Propinsi Djawa-Tengah

M O E N A D I.

Diundangkan pada tanggal 25 Djuni 1971.  
Sekretaris Daerah,

M.S. DJOENAIDI S.H.

Peraturan-daerah ini didjalankan berdasarkan pasal 79 ajat (1) U.U.  
No. 18 tahun 1965.

Dimuat dalam Lembaran Daerah Propinsi Djawa-Tengah Tahun 1971  
Seri A No. 3.

## P E N D J E L A S A N.

### 1. U M U M.

Meskipun menurut U.U. Pokok Kepegawaian (U.U. no.18 tahun 1961 L.N. no. 263 tahun 1961) Pegawai Daerah telah dijatakan sebagai Pegawai Negeri, namun pasal 65 (1) dan pasal 65 (2) U.U. no. 18 tahun 1965 tidak memungkinkan dijatakannya peraturan-peraturan kepegawaian bagi pegawai Pemerintah Pusat setjara otomatis berlaku bagi Pegawai Pemerintah Daerah.

Hal ini disebabkan karena antara lain akan bertentangan dengan prinsip otonomi.

### 2. Pasal demi Pasal.

2.1. Pasal 1 tjkup djelas.

2.2. Pasal 2 mulai berlakunja Peraturan Daerah ini sama dengan mulai berlakunja Instruksi Menteri Kuanagan sebagaimana dimaksud diatas.